



# **MINIMNYA PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA PEMATANG SEI BARU, KECAMATAN TANJUNG BALAI, KABUPATEN ASAHAN)**

**Sella Mita<sup>1)</sup>, Tiara Aulia Nurwana<sup>2)</sup>, Pani Andini<sup>3)</sup>, Elga Vasya Aura<sup>4)</sup>, Nurdin Nariga Sinulingga<sup>5)</sup>,  
Masrul Zuhri<sup>6)</sup>**

<sup>1)</sup>Ilmu Kehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [sellamita929@gmail.com](mailto:sellamita929@gmail.com)

<sup>2)</sup>Ilmu Kehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [ayu772269@gmail.com](mailto:ayu772269@gmail.com)

<sup>3)</sup>Ilmu Kehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [paniandini01@gmail.com](mailto:paniandini01@gmail.com)

<sup>4)</sup>Ilmu Kehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [elgavasya@gmail.com](mailto:elgavasya@gmail.com)

<sup>5)</sup>Ilmu Kehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [nurdinsinulingga937@gmail.com](mailto:nurdinsinulingga937@gmail.com)

<sup>6)</sup>Ilmu Kehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [masitama10@gmail.com](mailto:masitama10@gmail.com)

## **Abstract**

this study aims to examine the low implementation of Pancasila values as a philosophical system within the community life of Pematang Sei Baru Village. Using a descriptive qualitative approach, observations, interviews, and documentation were conducted to obtain factual information regarding the community's understanding of Pancasila values. Based on demographic data showing a total population of 4,494 people, with the majority working as fishermen, farm laborers, and students, the findings indicate that the internalization level of Pancasila values remains relatively low. Limited socialization, insufficient civic education, and the community's focus on economic activities are identified as the main factors hindering the implementation of the values of divinity, humanity, unity, deliberation, and social justice. These results highlight the importance of developing more effective and sustainable strategies for Pancasila value education, particularly at the village level, to ensure its continued relevance as a philosophical system in national life.

**Keywords:** Pancasila, Philosophical System, Implementation, Rural Community, Civic Education

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rendahnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Pematang Sei Baru. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan data jumlah penduduk yang mencapai 4.494 jiwa dengan profesi mayoritas sebagai nelayan, buruh tani, dan pelajar, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat internalisasi nilai Pancasila masih tergolong rendah. Minimnya sosialisasi, kurangnya pendidikan kewarganegaraan, serta orientasi masyarakat yang lebih berfokus pada aktivitas ekonomi menjadi faktor dominan yang menghambat penerapan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi pembinaan dan pendidikan nilai Pancasila yang lebih efektif dan berkelanjutan, terutama pada tingkat masyarakat desa, agar Pancasila tetap relevan sebagai sistem filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci:** Pancasila, Sistem Filsafat, Implementasi, Masyarakat Desa, Pendidikan Kewarganegaraan



## PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, serta sistem filsafat yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila bukan sekadar kumpulan nilai moral, tetapi juga mengandung<sup>1</sup> landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menuntun masyarakat untuk menjalankan nilai religius, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, pada realitasnya, penerapan Pancasila di berbagai daerah masih belum optimal. Perkembangan teknologi, modernisasi, serta meningkatnya tuntutan ekonomi sering kali menggeser nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan krisis internalisasi nilai Pancasila, terutama pada masyarakat desa yang seharusnya memiliki ikatan sosial yang kuat. Desa Pematang Sei Baru merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk 4.494 jiwa, terdiri dari 2.217 perempuan dan 2.277 laki-laki dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.270 Kartu Keluarga.

Komposisi pekerjaan masyarakat didominasi oleh petani (252 orang), buruh tani (355 orang), nelayan (500 orang), ABK (312 orang), Buruh nelayan (100 orang), wiraswasta (210 orang), pedagang (72 orang) dan pelajar (1923 orang). Dan profesi lain seperti PNS dan polri. Pola kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan ekonomi harian menyebabkan perhatian terhadap nilai Pancasila cenderung menurun, baik dalam aspek gotong royong, toleransi, musyawarah, maupun penegakan keadilan sosial. Minimnya penerapan Pancasila tampak dari semakin berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial desa, menurunnya sikap tenggang rasa antarwarga, serta lemahnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila turut memperlemah pemahaman masyarakat, terutama generasi muda. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pancasila diterapkan sebagai sistem filsafat dalam kehidupan masyarakat Desa Pematang Sei Baru. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerapan nilai Pancasila serta menawarkan solusi untuk memperkuat internalisasi nilai tersebut pada tingkat masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai minimnya penerapan nilai-nilai Pancasila di Desa Pematang Sei Baru. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap perilaku, pandangan, dan pengalaman<sup>2</sup> masyarakat, bukan pada pengukuran numerik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengamati fenomena sosial secara langsung dan menggali informasi sesuai konteks kehidupan masyarakat desa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, penyebaran kuisioner dalam bentuk Gform dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung interaksi sosial masyarakat, seperti kegiatan gotong royong, musyawarah, serta aktivitas sosial lainnya yang berkaitan dengan penerapan nilai Pancasila. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan perangkat desa dan warga desa untuk mengetahui pemahaman serta pengalaman mereka terkait nilai-nilai Pancasila. Dokumentasi diperoleh dari arsip desa, data kependudukan, catatan kegiatan, dan foto pendukung yang relevan dengan penelitian. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan persoalan yang diteliti. Dengan teknik ini, data yang diperoleh lebih terarah karena informan benar-benar terkait dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan:

1. Reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian;
2. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian atau tabel agar mudah dipahami;
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dan pola dari data yang telah dianalisis.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sementara triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh lebih kuat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam hasil penelitian lapangan mengenai minimnya

<sup>1</sup> Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2016.

<sup>2</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. Jakarta: Kemdikbud, 2017.



penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat di kehidupan bermasyarakat (studi kasus desa pematang sei baru). Analisis dilakukan dengan mengaitkan data empiris hasil wawancara kepada masyarakat dengan kerangka teoretis Penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan ini, pembahasan tidak hanya berhenti pada deskripsi angka, tetapi juga mencoba memahami makna sosial di balik jawaban responden.

Pendekatan pembahasan per tabel digunakan untuk menjaga keterkaitan antara data lapangan dan interpretasi akademik. Setiap tabel merepresentasikan aspek tertentu dari nilai Pancasila yang kemudian dianalisis secara kontekstual sesuai dengan realitas sosial masyarakat setempat.

### Gotong Royong sebagai Perwujudan Sila ke-3 Pancasila

**Tabel 1.** Pandangan Masyarakat tentang praktik gotong royong

| Jumlah | Jawaban       | Persentase (%)  |
|--------|---------------|-----------------|
| 20     | sangat setuju | 40%             |
| 30     | setuju        | 60%             |
| 0      | tidak setuju  | 0%              |
| Total  | 50 Responden  | Presentase 100% |

Berdasarkan tabel di atas, seluruh responden (100%) menyatakan bahwa aktivitas gotong royong masih terlihat di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai persatuan dan kebersamaan (sila ke-3) masih relatif kuat dalam kehidupan warga. Kegiatan tolong-menolong dalam masyarakat tampaknya telah mengakar menjadi budaya sosial, meskipun intensitasnya mungkin menurun dibandingkan masa lalu. Temuan ini menjadi indikasi bahwa nilai Pancasila belum sepenuhnya hilang di tengah masyarakat, terutama dalam aspek kerja sama sosial.

Jika ditinjau lebih dalam, tingginya persentase jawaban positif ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan dan menyelesaikan pekerjaan bersama-sama. Praktik gotong royong seperti membersihkan saluran air, memperbaiki fasilitas umum, ataupun membantu tetangga yang memiliki hajatan merupakan bentuk nyata dari nilai persatuan yang masih hidup. Kesadaran semacam ini menunjukkan bahwa meskipun modernisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah pola interaksi sosial, masyarakat Desa Pematang Sei Baru tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri utama kehidupan desa.

Namun, keberadaan gotong royong tidak selalu mencerminkan pelaksanaan nilai Pancasila yang menyeluruh. Beberapa kegiatan gotong royong cenderung bersifat insidental dan hanya dilakukan ketika ada instruksi dari aparat desa atau ketika terjadi peristiwa tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi gotong royong tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran pribadi sebagai bagian dari pengamalan Pancasila, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan praktis dan tuntutan sosial.

### Konflik Antarwarga dan Toleransi Berpendapat (Sila ke-2)

**Tabel 2.** Persepsi tentang konflik akibat perbedaan pendapat

| Jumlah | Jawaban       | Persentase (%)  |
|--------|---------------|-----------------|
| 5      | sangat setuju | 10%             |
| 20     | setuju        | 40%             |
| 25     | tidak setuju  | 50%             |
| Total  | 50 Responden  | Presentase 100% |

Berdasarkan tabel 2, Sebanyak 50% responden tidak setuju bahwa warga sering bertengkar karena perbedaan pendapat. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mampu menjaga hubungan sosial dan menerapkan nilai toleransi sebagaimana tercantum dalam sila ke-2 Pancasila.

Sikap saling menghargai dalam menyampaikan pendapat tampaknya masih dijunjung oleh sebagian besar warga, terutama pada kegiatan kemasyarakatan yang memerlukan kerja sama dan komunikasi antarindividu.

Namun demikian, terdapat 40% responden yang setuju bahwa konflik akibat perbedaan pendapat masih terjadi. Hal ini menandakan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum mampu mengendalikan emosi atau menempatkan nilai kemanusiaan secara proporsional ketika berinteraksi. Kondisi ini dapat muncul karena berbagai faktor, seperti perbedaan karakter, kepentingan tertentu, hingga pengaruh dinamika sosial yang berkembang di lingkungan desa. Temuan ini menjadi indikasi bahwa pemahaman terhadap nilai menghargai pendapat orang lain belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa implementasi toleransi dalam kehidupan masyarakat Desa Pematang Sei Baru belum sepenuhnya konsisten. Meskipun sebagian warga mampu menjaga<sup>3</sup> keharmonisan, potensi konflik tetap ada dan sering kali dipicu oleh perbedaan latar belakang, faktor emosional, atau isu-isu lokal yang sensitif. Oleh karena itu, diperlukan

<sup>3</sup> Budiyo. Sosiologi Konflik Masyarakat Desa. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.



penguatan nilai karakter dan pembiasaan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, agar masyarakat mampu menerapkan nilai kemanusiaan secara lebih menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.

### Pendidikan Pancasila di Sekolah dan Lingkungan Keagamaan

**Tabel 3.** persepsi tentang pembelajaran Pancasila

| Jumlah | Jawaban       | Persentase (%)  |
|--------|---------------|-----------------|
| 30     | sangat setuju | 60%             |
| 15     | setuju        | 30%             |
| 5      | Tidak setuju  | 10%             |
| Total  | 50 Responden  | Persentase 100% |

Berdasarkan tabel 3, Sebagian besar responden (90%) menilai bahwa Pancasila masih diajarkan dengan baik, baik di sekolah maupun lembaga keagamaan seperti masjid. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya terputus. Namun demikian, adanya 10% responden yang tidak setuju mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat merasakan adanya penurunan keteladanan atau kurangnya penekanan nilai Pancasila dalam pendidikan formal maupun informal. Temuan ini memberikan isyarat bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila perlu diperkuat, terutama dalam konteks generasi muda.

### Kejujuran dalam Jual Beli (Sila Kelima Pancasila)

**Tabel 4.** Kejujuran dalam Jual Beli

| Jumlah | Jawaban       | Persentase (%)  |
|--------|---------------|-----------------|
| 15     | sangat setuju | 30%             |
| 30     | setuju        | 60%             |
| 5      | tidak setuju  | 10%             |
| Total  | 50 Responden  | Persentase 100% |

Berdasarkan tabel 4, sebanyak 60% responden menyatakan setuju dan 30% responden menyatakan sangat setuju bahwa kejujuran dalam kegiatan jual beli telah terjaga, sehingga 90% responden menilai nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Persentase ini menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam perilaku ekonomi masyarakat yang mengarah pada praktik yang adil dan bertanggung jawab.

Namun demikian, keberadaan 10% responden yang menyatakan tidak setuju tidak dapat diabaikan, karena menunjukkan bahwa praktik kecurangan atau ketidakadilan masih dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan nilai keadilan sosial belum berlangsung secara menyeluruh dan cenderung bersifat situasional. Dengan demikian, meskipun<sup>4</sup> secara umum nilai sila kelima telah diakui, implementasinya masih belum konsisten dan belum sepenuhnya menjadi budaya bersama dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

### Pemahaman Anak Muda terhadap Nilai Pancasila

**Tabel 5.** pemahaman anak muda tentang Pancasila

| Jumlah | Jawaban       | Persentase      |
|--------|---------------|-----------------|
| 15     | sangat setuju | 30%             |
| 15     | setuju        | 30%             |
| 20     | Tidak setuju  | 40%             |
| Total  | 50 Responden  | Persentase 100% |

Berdasarkan hasil pada Tabel 5, sebanyak 30% responden menyatakan sangat setuju dan 30% responden menyatakan setuju bahwa banyak anak muda belum memahami makna Pancasila dengan benar, sehingga secara keseluruhan 60% responden menilai tingkat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila masih tergolong rendah. Dominasi persentase ini menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa internalisasi Pancasila pada generasi muda belum berjalan secara optimal.

Sementara itu, 40% responden yang menyatakan tidak setuju menunjukkan bahwa masih terdapat pandangan yang menilai pemahaman generasi muda sudah cukup baik. Perbedaan pandangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan praktik nyata di lapangan. Kondisi tersebut dapat mencerminkan bahwa sebagian generasi muda mungkin hanya memahami Pancasila secara teoritis, namun belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, temuan ini mengisyaratkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pendidikan Pancasila, khususnya dalam menanamkan nilai yang bersifat kontekstual dan aplikatif, agar pemahaman generasi muda tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi berkembang menjadi sikap dan perilaku nyata.

### Toleransi Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat

**Tabel 6.** saling menghormati walaupun berbeda agama

| Jumlah | Jawaban       | Persentase (%) |
|--------|---------------|----------------|
| 20     | sangat setuju | 40%            |
| 30     | setuju        | 60%            |
| 0      | Tidak setuju  | 0%             |

<sup>4</sup> Notonagoro. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.



|       |              |                 |
|-------|--------------|-----------------|
| Total | 50 Responden | Presentase 100% |
|-------|--------------|-----------------|

Berdasarkan hasil pada Tabel 6, sebanyak 60% responden menyatakan setuju dan 40% responden menyatakan sangat setuju bahwa kehidupan beragama di lingkungan masyarakat berlangsung dengan saling menghormati. Tidak adanya responden yang menyatakan tidak setuju menunjukkan bahwa secara perseptual 100% responden merasakan adanya penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa toleransi beragama telah menjadi norma sosial yang diterima secara luas oleh masyarakat.

Namun demikian, hasil ini juga perlu dicermati secara kritis, mengingat penilaian responden bersifat subjektif dan didasarkan pada pengalaman personal. Tingginya persentase persetujuan belum tentu sepenuhnya mencerminkan praktik toleransi yang konsisten dalam seluruh situasi sosial, melainkan dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang relatif homogen atau minim konflik. Oleh karena itu, meskipun nilai sila pertama Pancasila telah dirasakan secara umum, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa toleransi beragama tidak hanya bersifat situasional, tetapi benar-benar terinternalisasi sebagai sikap yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat.

### Penerapan Nilai Pancasila dalam Pemilihan Pemimpin Desa

**Tabel 7.** Pemilihan pemimpin desa berdasarkan nilai Pancasila

| Jumlah | Jawaban       | Persentase (%)  |
|--------|---------------|-----------------|
| 5      | sangat setuju | 10%             |
| 15     | setuju        | 30%             |
| 30     | Tidak setuju  | 60%             |
| Total  | 50 Responden  | Persentase 100% |

Berdasarkan hasil pada Tabel 7, sebanyak 60% responden menyatakan tidak setuju bahwa masyarakat jarang mempertimbangkan nilai Pancasila dalam memilih pemimpin desa. Persentase ini menunjukkan bahwa mayoritas responden meyakini nilai-nilai Pancasila masih menjadi acuan dalam proses pemilihan pemimpin di tingkat desa. Temuan ini mengindikasikan adanya kesadaran normatif masyarakat terhadap pentingnya Pancasila sebagai landasan dalam praktik demokrasi lokal.

Namun demikian, <sup>5</sup>keberadaan 40% responden yang menyatakan setuju (30%) dan sangat setuju (10%) menunjukkan bahwa hampir setengah masyarakat menilai

nilai Pancasila belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam menentukan pilihan politik. Kondisi ini mengindikasikan adanya jarak antara kesadaran ideologis dan praktik politik di lapangan. Dalam konteks ini, pemilihan pemimpin desa berpotensi masih dipengaruhi oleh faktor pragmatis, seperti kedekatan personal, kepentingan kelompok, atau pertimbangan jangka pendek, dibandingkan pertimbangan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, musyawarah, dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa penguatan pendidikan politik berbasis Pancasila masih diperlukan agar nilai-nilai tersebut tidak hanya diakui secara normatif, tetapi benar-benar diinternalisasi dan diwujudkan dalam proses demokrasi lokal secara konsisten.

### Kepatuhan terhadap Aturan Adat dibandingkan Pancasila

**Tabel 8.** Pandangan Masyarakat tentang Kepatuhan terhadap Aturan Adat dibandingkan Pancasila

| Jumlah | Jawaban       | Persentase (%)  |
|--------|---------------|-----------------|
| 5      | sangat setuju | 10%             |
| 15     | setuju        | 30%             |
| 30     | Tidak setuju  | 60%             |
| Total  | 50 Responden  | Persentase 100% |

Berdasarkan hasil pada Tabel 8, Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden (60%) tidak setuju bahwa warga lebih memilih aturan adat dibandingkan Pancasila dalam berurusan. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara normatif, Pancasila masih diakui sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran ini mencerminkan keberhasilan internalisasi Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki legitimasi lebih luas dibandingkan aturan adat yang bersifat lokal dan kontekstual.

Namun demikian, adanya 40% responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju menunjukkan bahwa dalam praktik sosial tertentu, aturan adat masih memiliki pengaruh yang kuat. Hal ini mengindikasikan adanya dualitas norma, di mana masyarakat menyesuaikan penggunaan Pancasila dan adat sesuai dengan situasi dan kepentingan praktis. Kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk pragmatisme sosial, namun sekaligus menjadi tantangan dalam memastikan konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila secara utuh.

<sup>5</sup> Soerjanto, A. Filsafat Pancasila dan Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.



## Peran Pemimpin Kecamatan dalam Mengingatnkan Nilai Pancasila

**Tabel 9.** Peran Pemimpin Kecamatan dalam Mengingatnkan Nilai Pancasila

| Jumlah | Jawaban       | Persentase (%)  |
|--------|---------------|-----------------|
| 5      | sangat setuju | 10%             |
| 40     | setuju        | 80%             |
| 5      | Tidak setuju  | 10%             |
| Total  | 50 Responden  | Persentase 100% |

Berdasarkan hasil pada Tabel 9, Tingginya persentase responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju (90%) menunjukkan bahwa pemimpin lokal memiliki peran aktif dalam menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam forum formal seperti rapat desa. Hal ini menegaskan bahwa struktur pemerintahan lokal masih berfungsi sebagai saluran utama penyebaran ideologi negara.

Meskipun demikian, dominasi jawaban “setuju” dibandingkan “sangat setuju” dapat mengindikasikan bahwa penyampaian nilai Pancasila masih bersifat seremonial dan normatif, belum sepenuhnya menyentuh aspek praksis. Artinya, Pancasila sering diingatkan sebagai slogan atau simbol, namun belum selalu diterjemahkan menjadi pedoman nyata dalam pengambilan keputusan dan kebijakan desa.

## Pancasila sebagai Dasar Kerukunan dan Kedamaian Hidup Sehari-hari

**Tabel 10.** Implementasi nilai-nilai pancasila secara umum

| Jumlah | Jawaban       | Persentase (%)  |
|--------|---------------|-----------------|
| 20     | sangat setuju | 40%             |
| 30     | setuju        | 60%             |
| 0      | Tidak setuju  | 0%              |
| Total  | 50 Responden  | Persentase 100% |

Berdasarkan hasil pada Tabel 10, Tingginya tingkat persetujuan terhadap pernyataan ini menunjukkan kuatnya citra toleransi dalam persepsi masyarakat. Namun, tidak ditemukannya jawaban “tidak setuju” justru memunculkan pertanyaan kritis mengenai objektivitas dan kejujuran sosial responden. Dalam konteks isu keagamaan, jawaban responden sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang menempatkan toleransi sebagai nilai ideal dan “wajib diakui”. Kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya social desirability bias, yaitu kecenderungan responden

untuk memberikan jawaban yang dianggap paling dapat diterima secara moral, sosial, dan ideologis, bukan jawaban yang sepenuhnya merefleksikan pengalaman nyata.

Lebih jauh, persepsi hidup yang “tenang” tidak secara otomatis dapat disamakan dengan terwujudnya toleransi yang aktif dan substansial. Ketenteraman sosial bisa saja terbentuk karena minimnya interaksi lintas agama yang intens, atau karena absennya konflik terbuka, bukan karena adanya sikap saling memahami dan menghargai perbedaan secara mendalam. Dalam kondisi seperti ini, toleransi yang berkembang cenderung bersifat pasif, di mana kelompok-kelompok yang berbeda hidup berdampingan tanpa konflik, tetapi juga tanpa dialog dan keterlibatan yang bermakna.

Toleransi pasif semacam ini memiliki karakter yang rapuh dan rentan terhadap gangguan. Ketika muncul isu sensitif, provokasi identitas, atau kepentingan politik yang mengeksploitasi perbedaan agama, stabilitas semu tersebut berpotensi terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai yang sadar dan reflektif, melainkan masih bergantung pada situasi sosial yang relatif aman dan terkendali.

Dengan demikian, tingginya tingkat persetujuan responden perlu dibaca secara kritis, tidak hanya sebagai indikator keberhasilan implementasi sila pertama Pancasila, tetapi juga sebagai sinyal perlunya pendalaman kualitas toleransi itu sendiri.

Tantangan utama bukan sekadar mempertahankan ketenangan sosial, melainkan mendorong tumbuhnya toleransi aktif yang ditandai oleh dialog, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai bagian dari kesadaran kolektif masyarakat.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila masih memiliki posisi yang kuat dalam kesadaran normatif masyarakat. Mayoritas responden menunjukkan sikap setuju terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, baik dalam aspek kepatuhan terhadap norma, peran pemimpin lokal, kehidupan beragama, maupun penciptaan kerukunan sosial. Hal ini menandakan bahwa secara konseptual Pancasila masih diterima dan diakui sebagai ideologi negara.

Namun demikian, temuan penelitian ini juga mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara pengakuan normatif terhadap Pancasila dan implementasinya dalam praktik sosial sehari-hari. Tingginya tingkat persetujuan responden dalam berbagai

<sup>6</sup> Hidayat, M. Etika Sosial dan Kehidupan Bermasyarakat. Malang: UMM Press, 2019.



pernyataan cenderung merefleksikan loyalitas simbolik dan kepatuhan terhadap wacana resmi negara, bukan sepenuhnya pengalaman empiris yang kritis. Fenomena ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila masih berada pada tataran formal dan seremonial, belum sepenuhnya menjelma sebagai pedoman reflektif dalam tindakan sosial.

Selain itu, penelitian ini memperlihatkan adanya kompetisi nilai antara Pancasila dan norma lokal, khususnya aturan adat, yang dalam praktik tertentu masih dianggap lebih efektif dan relevan oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa Pancasila belum sepenuhnya menjadi kerangka evaluatif utama dalam pengambilan keputusan sosial, melainkan berjalan berdampingan secara pragmatis dengan norma-norma lain yang memiliki kekuatan sanksi sosial lebih langsung.

Dalam konteks kehidupan beragama dan kerukunan sosial, rasa aman dan damai yang dirasakan masyarakat tidak selalu mencerminkan toleransi yang aktif dan substantif. Ketenteraman sosial cenderung dibangun di atas stabilitas semu, minim konflik terbuka, serta tekanan norma sosial untuk menampilkan citra toleran. Akibatnya, toleransi yang berkembang berpotensi bersifat pasif, rapuh, dan mudah terganggu ketika muncul perbedaan kepentingan, provokasi identitas, atau konflik struktural.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan utama implementasi Pancasila saat ini bukan terletak pada kurangnya pemahaman atau sosialisasi melainkan pada kegagalan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila dari simbol ideologis menjadi praktik sosial yang kritis, kontekstual, dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih substansial untuk mendorong internalisasi nilai Pancasila secara reflektif, dialogis, dan aplikatif agar Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi sosial, tetapi juga sebagai dasar transformasi kehidupan bermasyarakat.

## Saran

Pemerintah dan pemimpin lokal perlu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konkret dalam kebijakan dan praktik sosial, tidak hanya menyampaikannya secara seremonial.

Masyarakat diharapkan mengembangkan sikap toleransi yang aktif dan reflektif melalui dialog terbuka, bukan sekadar menjaga ketenangan sosial tanpa pemahaman mendalam.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode yang lebih mendalam untuk mengkaji kesenjangan antara pemahaman normatif dan praktik nyata nilai Pancasila di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPIP. Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020.
- Budiyono. Sosiologi Konflik Masyarakat Desa. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- H. Santoso, Pancasila dan Realitas Sosial. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Hidayat, M. Etika Sosial dan Kehidupan Bermasyarakat. Malang: UMM Press, 2019.
- Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. Jakarta: Kemdikbud, 2017.
- Notonagoro. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Notonagoro. Pancasila: Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Putra, R. D. "Konflik Sosial di Desa dan Faktor Penyebabnya." *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Soerjanto, A. Filsafat Pancasila dan Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunarto. Perilaku Sosial dalam Masyarakat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Suyanto, "Ideologi dan Tantangan Masyarakat Modern," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 14 No. 1 (2021).
- Wuryaningsih, D. "Tantangan Implementasi Nilai Pancasila dalam Masyarakat Multikultural." *Jurnal Civic Education*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Yudi Latif, Wawasan Pancasila Abad ke-21. Jakarta: Mizan, 2020.